

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Adanya sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong diterapkannya otonomi daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya otonomi daerah maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk tertib, transparan, dalam mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu upaya mewujudkan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah maka diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan memiliki kualitas. Menurut (Mulyana, 2010) Kualitas laporan keuangan yaitu sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan yang ada didalam laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang

menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksa yang dilakukan Badan pemeriksa Keuangan. Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMT).

Berikut data hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kudus serta temuannya dari tahun 2012-2017:

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012 s.d. 2017

LKPD (Tahun)	Opini
2012	WTP
2013	WTP
2014	WTP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP

*) Pemeriksaan LKPD Kabupaten Kudus TA 2012 s.d 2017

Dari tabel 1 yang menyajikan Hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Jawa Tengah TA 2012 s.d 2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kudus yang mendapatkan opini WTP selama 6 tahun berturut-turut.

Walaupun sudah 6 kali mengantongi opini WTP, fenomena yang terjadi dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus masih terdapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan, diantaranya laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan-peraturan dan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan, disertai dengan adanya dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Kudus, Mohammad Tamzil, sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tahun anggaran 2019. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana menerima hadiah terkait pengisian perangkat daerah di Pemkab Kudus dan menetapkan tiga tersangka yaitu Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Agus Soeranto pelaksana tugas Sekrtaris Dinas Badan Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Ahmad Sofyan. Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa Bupati Kudus dan sejumlah pihak lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 26 Juli 2019. Hal ini mendorong meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk menerapkan akuntabilitas publik melalui suatu media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dilaksanakan secara periodik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah agar informasi yang diperoleh dapat berkualitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah

daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan Standar akuntansi pemerintahan akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Selain berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan pun harus sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, bahwa seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan Pengawasan Internal. Namun, yang terjadi di masyarakat yang menggambarkan pengelolaan keuangan belum berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran

anggaran yang timbul akibat praktek pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran belanja yang tersedia, sementara penerima anggaran harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Akibatnya penerima anggaran berusaha untuk memperoleh bukti transaksi guna mendukung pertanggungjawaban realisasi anggaran sebagai wujud akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah yang diragukan kebenarannya. Sehingga diperlukannya alat pengendali yang disebut dengan sistem pengendalian internal pemerintah (Widyaningsih, 2015). Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. Faktor pendukung lain dari kualitas laporan keuangan yang baik adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input, proses dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi dari sistem pelaporan keuangan yang baik. (Kurniawan & Abdullah, 2014). Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab dalam penyiapan

informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Setiap manajemen dalam sebuah organisasi membutuhkan informasi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat manajemen maka akan semakin tinggi pula akurasi informasi keuangan yang dibutuhkan.

Menurut (Karsana & Suaryana, 2017) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut (Mahardini & Miranti, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut (Inapty & Martiningsih, 2016) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut (Sihite & Holiawati, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut (Budiawan & Purnomo, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh dari sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Menurut (Udiyanti, Atmadja, & Darmawan, 2014) dalam penelitiannya menyatakan kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut (Nurillah & Muid, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia atau kompetensi staf akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut (Evelin, 2017) dalam penelitiannya menyatakan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut (Untary & Ardiyanto, 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Sihite & Holiawati, 2017) dengan judul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambah satu variabel yaitu sistem informasi akuntansi, karena Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan dari suatu proses penyampaian informasi akuntansi secara tepat, cepat, dan akurat yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan input yang baik. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar, sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem menggunakan komputerisasi yang akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya.

Penelitian ini akan dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), oleh karena itu judul penelitian ini adalah *“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah)”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini dapat menarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan paparan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak pada umumnya yaitu:

1. Aspek teoritis (Keilmuan)

Penelitian dalam aspek teoritis diharapkan mampu dan dapat memberikan manfaat bagi Ilmu Ekonomi khususnya dalam bidang Akuntansi yaitu Akuntansi Keuangan Sektor Publik karena penelitian ini meneliti tentang standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi staf akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Aspek Praktis (Guna Laksana)

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta sebagai bahan dasar pertimbangan pemerintah untuk mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang. Bagi peneliti yang lain diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi staf akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Dan juga dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi khususnya Akuntansi Keuangan Sektor Pemerintah.